



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : DEPARTEMEN REGIONAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARIEF HARTAWAN**
2. Jabatan : **KEPALA DEPARTEMEN**
3. NHK : **240997**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 24.222.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/222 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 375 m2/47 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 413 m2/121 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 573 m2/210 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDAR LAMPUNG , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
5. Tanah Seluas 375 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
6. Tanah Seluas 26410 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG UTARA, WARISAN Rp. 6.602.500.000
7. Tanah Seluas 429 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG UTARA, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 1.514.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
2. MOBIL, MITSHUBISHI PAJERO SPORTS DAKAR 4X2 AT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 480.000.000



3. MOBIL, DAIHATSU TERIOS AT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
4. MOBIL, TOYOTA VOXY CVT 2.0 LUXURY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000
5. MOBIL, HYUNDAI STARGAZER PRIME Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 255.000.000
6. MOTOR, HONDA VARIO VARIO 160 CC Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 26.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	115.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	7.152.083.750
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	372.421.459
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	33.376.005.209
III. HUTANG	Rp.	394.620.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	32.981.385.209

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.